

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PUTUS SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) dan
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

WAHYURI VITRIANI
2007/88886

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

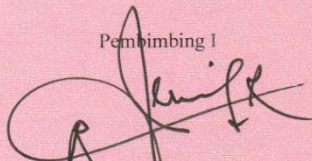
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PUTUS SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI INDONESIA

Nama : Wahyuri Vitriani
BP/NIM : 2007/88886
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2012

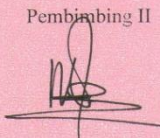
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Idris, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 005

Pembimbing II



Muhammad Irfan, SE, M.Si
NIP. 19770409 200312 1 002

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Alf Anis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

ABSTRAK

Wahyuri Vitriani (88886/2007): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Putus Sekolah pada SMP di Indonesia. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di Bawah Bimbingan Bapak Dr. H. Idris, M.Si dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si

Pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu jalan yang ditempuh pemerintah untuk memajukan mutu pendidikan dasar adalah dengan program wajib belajar sembilan tahun. Program wajib belajar sudah berjalan dengan baik. Namun demikian program wajib belajar sembilan tahun dihadapkan pada kenyataan berupa masih tingginya angka putus sekolah pada SMP di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia, yaitu: tingkat kemiskinan(X_1), beban ketergantungan (X_2) dan geografis (X_3). Penelitian ini menggunakan metode pooling atau panel yaitu kombinasi 33 propinsi di Indonesia dari tahun 2007 sampai 2010. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Tingkat kemiskinan Indonesia tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia. (2) Beban ketergantungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia dengan besaran pengaruhnya 4,31 persen. (3) Geografis Indonesia berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia dengan besaran pengaruhnya 1,23 persen. (4) Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan geografis terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia dengan tingkat sumbangan secara bersama-sama sebesar 0,35 persen. Dari hasil penelitian ini, maka disarankan kepada pemerintah untuk memperluas program-program pengentasan kemiskinan, meningkatkan status sosial dan ekonomi kaum wanita, mendirikan sekolah berasrama dan pemberian bus sekolah. Dengan demikian tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia dapat ditekan. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat putus sekolah seperti biaya pendidikan pada berbagai tingkatan jenjang pendidikan di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Putus Sekolah pada SMP di Indonesia”***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Idris, M.Si dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Idris, M.Si, Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si, Ibu Yeniwati, SE dan Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Amar B. MS selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibu Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Bapak Dr. H. Idris, M.Si selaku pembimbing akademik (PA) yang telah membimbing selama belajar di Fakultas Ekonomi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

6. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
7. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Indonesia beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
8. Teristimewa penulis persembahkan buat Ibunda tercinta dan Ayahanda Tercinta yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Special penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak (keluarga di Padang) yang telah memberikan bantuan doa, moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2007.
11. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Februari 2012

Penulis

WAHYURI VITRIANI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
A. Kajian Teori	14
1. Pentingnya Pendidikan.....	14
2. Tingkat Putus Sekolah	18
a. Defenisi Putus Sekolah	18
b. Teori Permintaan Pendidikan.....	18
3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Putus Sekolah	
a. Tingkat Kemiskinan.....	20
b. Beban Ketergantungan.....	24
c. Geografis.....	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual	32
D. Hipotesis	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Variabel Penelitian	36
F. Definisi Operasional	37
G. Teknik Analisis Data	37
1. Analisis Deskriptif	38
2. Analisis Induktif.....	38
a. Uji Asumsi Klasik.....	38
1) Uji Multikolinearitas.....	38
2) Uji Heterokedastisitas	39
3) Uji Autokorelasi.....	39
b. Model Regresi Panel	41
c. Koefisien Determinasi	44
d. Pengujian Hipotesis	45
1) Uji T (t-Test)	45
2) Uji F.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	48
a. Keadaan Geografis Indonesia	48
b. Keadaan Penduduk Indonesia	50
2. Deskripsi Variabel Penelitian	51
a. Deskripsi Tingkat Putus Sekolah pada SMP di Indonesia.....	51
b. Deskripsi Tingkat Kemiskinan di Indonesia.....	54
c. Deskripsi Beban Ketergantungan di Indonesia.....	56
d. Deskripsi Geografis di Indonesia.....	59
3. Analisis Induktif.....	61
a. Uji Asumsi Klasik.....	61

1.) Uji Multikolinearitas	61
2.) Uji Heterokedastisitas	62
3.) Uji Autokorelasi.....	63
b. Analisis Model Regresi Panel	64
1.) Hasil Uji Hausman	64
2.) Hasil Uji Chow Test.....	64
3.) Analisis Model Regresi Panel	65
c. Koefisien Determinasi	67
d. Pengujian Hipotesis	67
1.) Uji T	67
2.) Uji F	69
B. Pembahasan.....	70
1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia	70
2. Pengaruh Beban Ketergantungan terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia	73
3. Pengaruh Geografis terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia	75
4. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Beban Ketergantungan dan Geografis terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia	77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR REFERENSI	82

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Data Tingkat Putus Sekolah pada SMP, Tingkat Kemiskinan dan Beban Ketergantungan di Indonesia Tahun 2010	6
2. Penelitian Terdahulu	27
3. Klasifikasi Nilai d (D-W)	40
4. Perkembangan Tingkat Putus Sekolah (%) pada SMP di Indonesia Tahun 2007-2010	52
5. Tingkat Kemiskinan (%) di Indonesia Tahun 2007-2010	55
6. Beban Ketergantungan (Orang) di Indonesia Tahun 2007 – 2010	57
7. Pengelompokan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur	60
8. Hasil Uji Multikolinearitas	61
9. Hasil Uji Heterokedastisitas	63
10. Hasil Uji Autokorelasi.....	63
11. Hasil Uji Hausman	64
12. Hasil Uji Chow-Test	64
13. Hasil Estimasi Model Regresi Panel	65

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1. Pentingnya Pendidikan.....	17
2. Kerangka Konseptual Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Putus Sekolah pada SMP di Indonesia	33

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. Tabulasi Data Penelitian	84
2. Hasil Uji Multikolinearitas	86
3. Hasil Uji Heterokedastisitas	89
4. Hasil Uji Model Regresi Panel	90
5. Tabel Durbin-Watson	91
6. Tabel T	93
7. Tabel F	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap negara selalu menginginkan kemajuan dalam pembangunan di negaranya seperti Negara Indonesia. Pembangunan yang dilakukan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Berhasilnya pembangunan suatu negara terlihat dari meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) negara tersebut.

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dari peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini diperkuat lagi pada Ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) tahun 2003 adalah pendidikan 9 tahun. Ini berarti pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia adalah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Salah satu jalan yang ditempuh pemerintah untuk memajukan mutu pendidikan dasar adalah dengan program wajib belajar 9 tahun yang sudah

dicanangkan sejak bulan Mei tahun 1994. Pemerintah berharap program wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu cara untuk dapat mencerdaskan anak bangsa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau sehingga seluruh anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan dasar. Pemerintah menganggap bahwa anak sebagai asset bangsa perlu diberdayakan dan diberi pengetahuan yang cukup agar kelak mampu menata dirinya dan negaranya.

Pendidikan merupakan tujuan utama pembangunan karena manusia yang berkualitas merupakan sumber daya utama pembangunan bangsa. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Penyerapan teknologi modern dapat mempermudah Negara Indonesia dalam mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak tersedia di Indonesia sehingga negara tidak perlu mendatangkan ahli dari negara lain dan hasil bumi yang diperoleh pun dapat bersaing dipasaran berkat kualitas produksi yang dihasilkan.

Program wajib belajar 9 tahun sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh kecendrungan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP. Pada tahun 2003 sebesar 63,49 persen telah mengalami peningkatan menjadi 67,73 persen pada tahun 2010. Namun demikian program wajib belajar 9 tahun dihadapkan pada kenyataan berupa masih cukup tingginya angka putus sekolah tingkat SMP di Indonesia.

Tiga tahun terakhir ini angka putus sekolah tingkat SMP tidak mengalami peningkatan yang berarti. Angka putus sekolah pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,45 persen dari tahun 2008 menjadi 2,49 persen yang sebelumnya pada tahun 2008 sebesar 3,94 persen. Penurunan angka putus sekolah tingkat SMP juga terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,43 persen.

Laporan MDGs (UNDP, Bappenas 2010) mengungkapkan bahwa faktor ekonomi berupa tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan salah satu faktor penting penyebab putus sekolah. Anak – anak dari rumah tangga miskin memiliki akses pendidikan yang rendah karena relatif besarnya biaya pendidikan langsung maupun tidak langsung. Biaya pendidikan langsung contohnya adalah sumbangan pembangunan dan uang masuk sekolah, sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya beli buku serta biaya lain untuk keperluan sekolah. Pada saat yang bersamaan, putus sekolah merupakan gambaran dari tekanan bagi anak usia SMP untuk memasuki pasar kerja. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga. Bahkan ada diantara mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Pemerataan pendidikan juga terkendala oleh faktor geografis. Layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Khususnya masyarakat yang tinggal di Indonesia bagian timur. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Elfindri dkk (2006) di Propinsi Sumatera Barat menemukan bahwa daerah – daerah yang paling rawan dalam arti tingkat putus sekolah tertinggi berada pada tiga lokasi, yaitu daerah tepian pantai, perkebunan dan daerah pinggiran hutan. Daerah tersebut dikhawatirkan dalam

jangka panjang akan menyumbangkan kegagalan dalam pencapaian pemerataan pendidikan pada program wajib belajar sembilan tahun.

Selain biaya pendidikan, tingkat kemiskinan dan geografis, beban ketergantungan juga mempengaruhi tingkat putus sekolah di Indonesia. Permintaan atau hasrat suatu keluarga untuk mendapatkan sejumlah anak ditentukan oleh preferensi keluarga itu sendiri atas sejumlah anak yang dianggap bisa terus bertahan hidup. Bagi masyarakat miskin dipandang sebagai suatu investasi ekonomi yang nantinya diharapkan akan mendatangkan suatu hasil yang baik dalam bentuk tambahan tenaga kerja maupun sebagai sumber finansial orang tua usia lanjut.

Pertambahan penduduk yang sedemikian cepat menimbulkan berbagai permasalahan serius bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya berbagai masalah ekonomi, sosial dan psikologi yang semuanya itu melatarbelakangi kondisi keterbelakangan bagi masyarakat di Negara Indonesia.

Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik. Meningkatnya beban ketergantungan dapat mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Kondisi ini akan memperparah perekonomian masyarakat miskin, sehingga kebutuhan terhadap pendidikan tidak terpenuhi karena pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Kebutuhan terhadap pendidikan tidak dapat terpenuhi sehingga menuntut anak

dari keluarga miskin untuk putus sekolah. Bahkan tidak jarang dari mereka juga ikut membantu orang tua mereka dalam mencari nafkah.

Melihat pengaruh tingkat penduduk dan beban ketergantungan terhadap tingkat putus sekolah SMP di Indonesia, maka dibawah ini disajikan data tingkat penduduk miskin, beban ketergantungan dan tingkat putus sekolah SMP di Indonesia tahun 2010 dalam bentuk tabel 1.

Tabel 1 memperlihatkan variasi yang tinggi pada angka putus sekolah antar propinsi di Indonesia pada tahun 2010. Angka putus sekolah terendah dicapai oleh Propinsi Sumatera Utara sebesar 0,02 persen. Sedangkan tercatat pada Propinsi Riau angka putus sekolah tertinggi sebesar 5,96 persen. Angka putus sekolah menunjukkan ketimpangan yang tajam antar propinsi dalam menekan putus sekolah untuk mencapai wajib belajar 9 tahun.

Tabel 1 menggambarkan bahwa propinsi dengan tingkat putus sekolah tertinggi pada tahun 2010 berada pada Propinsi Riau yaitu sebesar 5,96 persen. Faktor penyebabnya kemungkinan oleh tingginya biaya pendidikan karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula biaya pendidikannya. Kepala Bidang Pelayanan dan pemberdayaan Sosial Dinas Sosial mengatakan bahwa tingginya angka putus sekolah ini dikarenakan oleh terbenturnya biaya pendidikan dan faktor geografis. Kebanyakan dari mereka yang putus sekolah adalah anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sedangkan daerah yang paling banyak anak putus sekolah adalah didaerah pinggiran yaitu Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tenayan Raya.

www.kompas.com

Tabel 1 : Data Tingkat Putus Sekolah pada SMP, Tingkat Kemiskinan dan Beban Ketergantungan di Indonesia Tahun 2010

No	Propinsi	Tingkat Putus Sekolah pada SMP (%)	Tingkat kemiskinan (%)	Beban Ketergantungan (orang)
1	Aceh	0.35	21.0	53
2	Sumatera Utara	0.02	11.3	54
3	Sumatera Barat	0.04	9.5	54
4	Riau	5.96	8.7	52
5	Kepulauan Riau	0.87	8,1	49
6	Jambi	0.91	8.3	51
7	Sumatera Selatan	2.34	15.5	50
8	Kep. Bangka Belitung	2.51	6.5	46
9	Bengkulu	2.65	18.3	48
10	Lampung	3.59	18.9	50
11	DKI Jakarta	1.47	3.5	37
12	Jawa Barat	5.29	11.3	47
13	Banten	5.04	7.2	52
14	Jawa Tengah	0.63	16.6	47
15	DI Yogyakarta	0.24	16.8	37
16	Jawa Timur	1.39	15.3	41
17	Bali	0.31	4.9	43
18	Nusa Tenggara Barat	2.27	21.6	55
19	Nusa Tenggara Timur	0.84	23.0	59
20	Kalimantan Barat	0.99	9.0	54
21	Kalimanta Tengah	0.27	6.8	48
22	Kalimantan Selatan	2.21	5.2	45
23	Kalimantan Timur	1.48	7.7	45
24	Sulawesi Utara	0.05	9.1	42
25	Gorontalo	4.27	23.2	48
26	Sulawesi Tengah	2.9	18.1	48
27	Sulawesi Selatan	0.7	11.6	50
28	Sulawesi Barat	0.11	13.6	49
29	Sulawesi Tenggara	1.71	17.1	57
30	Maluku	1.66	27.7	55
31	Maluku Utara	0.03	9.4	54
32	Papua	2.73	36.8	48
33	Papua Barat	0.43	34.9	48
Indonesia		2.06	14.6	49

sumber: www.depdiknas.go.id dan www.bps.go.id

Propinsi Gorontalo adalah propinsi keempat yang tingkat putus sekolahnya tertinggi selama tahun 2010. Ini kemungkinan disebabkan oleh Propinsi Gorontalo

adalah propinsi yang baru dibentuk. Biaya pendidikan yang tinggi kemungkinan juga mempengaruhi tingginya tingkat putus sekolah di Propinsi Gorontalo. Selain itu pandangan sosiokultural terhadap gender kemungkinan juga mempengaruhi tingginya tingkat putus sekolah. Beberapa wilayah masih ditemukan adanya anggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak bersekolah terlalu tinggi. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan anaknya. Propinsi Gorontalo dapat juga dikatakan mempunyai tingkat penduduk miskin yang tinggi. Tingkat kemiskinan di Propinsi Gorontalo sebesar 23,2 persen. Kemiskinan yang tinggi kemungkinan dapat juga mempengaruhi tingginya tingkat putus sekolah di propinsi tersebut.

Tabel 1 mendeskripsikan suatu kenyataan yang unik pada Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. Kedua propinsi tersebut adalah propinsi yang tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, sedangkan tingkat putus sekolahnya dapat digolongkan sebagai propinsi yang tingkat putus sekolah terendah. Fenomena ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh APM yang rendah sehingga untuk putus sekolah tingkat SMP pun sedikit pula. Selain itu kemungkinan lain disebabkan oleh siswa banyak yang hanya tamat SD saja dan tidak melanjutkan ke tingkat SMP (tingginya tingkat putus sekolah SD) dan masyarakat yang berusia SMP masih rendah.

Propinsi Sumatera Utara merupakan propinsi yang tingkat putus sekolahnya terendah yaitu sebesar 0,02 persen. Fakta ini kemungkinan dikarenakan oleh perhatian pemerintah yang semakin membaik. Pemerintah memberikan bantuan kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu

seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan bersekolah. Pemerintah berharap BSM dapat membantu siswa dalam mencapai cita-citanya.

Tabel 1 menunjukkan bahwa propinsi yang tingkat kemiskinan tertinggi adalah Propinsi Papua yaitu sebesar 36,8 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh konflik yang sering terjadi di Papua. Konflik akan memakan banyak biaya sehingga biaya hidup juga meningkat yang berakibat tingginya tingkat kemiskinan di Propinsi Papua. Penduduk Papua kebanyakan tinggal di desa-desa kecil yang tersebar luas. Banyak dari penduduk desa bermata pencarian sebagai petani. Sekitar 30 persen penduduk tinggal beberapa keluarga dalam satu rumah di desa yang sama. Faktor malas berusaha kemungkinan juga menyebabkan Propinsi Papua menjadi propinsi yang tingkat kemiskinan tertinggi sepanjang tahun 2010 di Indonesia. Penduduk papua yang berpendidikan rendah, biasanya hidup di lingkungan yang sangat sederhana.

Tingkat kemiskinan terendah berada pada Propinsi DKI Jakarta sebesar 3,5 persen. Fakta ini kemungkinan disebabkan oleh DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Apalagi DKI Jakarta mempunyai PDRB terkaya dibandingkan propinsi lain. PDRBnya berada diatas rata-rata PDRB nasional. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa kinerja perekonomian pemerintah Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir ini semakin membaik. Indikasinya adalah struktur perekonomian DKI Jakarta telah bergeser menjadi propinsi dengan sektor jasa dari semula sebagai propinsi industri manufaktur atau pengolahan.

Berdasarkan tabel 1 bahwa beban ketergantungan di 33 propinsi menunjukkan perbedaan yang tidak begitu tajam. Rata – rata beban ketergantungan di Indonesia sebesar 49 orang. Angka ini tergolong masih tinggi. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk yang berusia produktif menanggung 49 orang penduduk yang berusia tidak produktif. Hampir dua orang penduduk yang berusia produktif menanggung satu orang yang berusia tidak produktif. Kenyataan ini kemungkinan disebabkan komposisi penduduk yang setiap tahunnya meningkat.

Tabel 1 menggambarkan bahwa propinsi yang memiliki beban ketergantungan terendah adalah Propinsi DKI Jakarta sebesar 37 orang. Setiap 100 orang yang produktif menanggung 37 orang yang tidak produktif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penduduk DKI Jakarta didominasi oleh penduduk yang berusia produktif. Ini terbukti pada tahun 2010 tersebut jumlah penduduk yang berusia produktif adalah 6.792.500 jiwa, sementara jumlah penduduk secara keseluruhannya sebesar 9.294.900 orang. Lebih dari setengah jumlah penduduk DKI Jakarta berusia produktif. Ini kemungkinan berarti mayoritas penduduknya DKI Jakarta sudah bekerja.

Rendahnya beban ketergantungan di propinsi DKI Jakarta kemungkinan dikarenakan oleh biaya oportunitas (*opportunity cost*) yang rendah. Biaya oportunitas berupa waktu sang ibu yang habis untuk memelihara anak sehingga ia tidak sempat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang produktif. Pendapatan yang dapat diperoleh apabila sang ibu tidak memelihara anak-anaknya sehingga ia dapat memanfaatkan waktu untuk bekerja. Bekerjanya sang ibu dapat membantu

dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga tingkat kemiskinan juga berkurang. Hal ini juga tercermin pada tabel 1 diatas bahwa beban ketergantungan, tingkat penduduk miskin dan tingkat putus sekolah di Propinsi DKI Jakarta tersebut sama-sama rendah.

Propinsi yang mempunyai beban ketergantungan terbesar adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu sebesar 59 orang. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran. Faktor geografis berupa jauhnya tempat tinggal dari layanan kesehatan (seperti puskesmas) menyebabkan tingginya tingkat kelahiran. Program Keluarga Berencana (KB) masih belum terealisasi di Propinsi NTT. Akses pelayanan kesehatan terutama ketersediaan fasilitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) modern masih jauh dari tempat tinggal penduduk. Tradisi kaum wanita untuk menikah pada usia yang relatif muda. Akibatnya jumlah pasangan yang menikah lebih banyak dan periode subur untuk memproduksi menjadi panjang sehingga tingkat kelahiran tinggi. Tingginya tingkat kelahiran akan menambah beban ketergantungan keluarga yang juga meningkatkan kemiskinan yang pada akhirnya dapat menambah tingkat putus sekolah di Indonesia.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PUTUS SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI INDONESIA”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk lebih jelasnya masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan yang meningkat.
2. Beban ketergantungan yang masih tinggi.
3. Kawin muda.
4. Faktor geografis.
5. Sosial budaya.
6. Biaya pendidikan yang tinggi.
7. Pendidikan orang tua yang masih rendah.
8. Infrastruktur yang kurang lengkap.
9. Motivasi belajar yang masih rendah.

C. PEMBATAHAN MASALAH

Agar penulisan dan pembahasan lebih terarah kepada sasaran yang hendak dicapai, untuk itu perlu dilakukan pembatasan masalah dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas. Pembatasan masalah dari variabel yang mempengaruhi tingkat putus sekolah di Indonesia adalah tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan geografis. Sedangkan tingkat putus sekolah dibatasi pada tingkat putus sekolah SMP.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Sejauhmana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia ?
2. Sejauhmana pengaruh beban ketergantungan terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia ?
3. Sejauhmana pengaruh geografis terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia ?
4. Sejauhmana pengaruh tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan geografis terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia ?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh beban ketergantungan terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh geografis terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan geografis terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia.

F. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Manusia.
3. Masukan bagi pemerintah maupun lembaga – lembaga lain dalam mengambil kebijakan terutama mengenai permasalahan putus sekolah di Indonesia.
4. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Pentingnya Pendidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. Pendidikan dapat pula diartikan sebagai sebuah proses timbal balik dari pribadi-pribadi manusia dalam menyesuaikan diri dengan manusia lain dan alam semesta. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Sedangkan United Nations, *Report on the world Social Situation* (1997) menyatakan bahwa pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi.

Payaman Simanjuntak (2000:69) menuturkan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan

keterampilan bekerja, dengan demikian dapat meningkatkan produktifitas kerja. Pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja atau penghasilan.

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal pada manusia. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan material atau fisik berupa gedung, jembatan dan lain-lain. Padahal sukses atau tidaknya pembangunan fisik tersebut justru sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan manusianya. (Tirtarahardja, 2005:300)

Pendidikan sebagai upaya maksimal dan menyeluruh yang hasilnya tidak akan segera dapat dirasakan dan dilihat, ada proses yang panjang antara dimulainya usaha dengan ketercapaian hasil. Andil yang diberikan pendidikan pada pembangunan dipandang sebagai suatu kesatuan umum, maka pendidikan merupakan suatu komponen atau bagian dari pembangunan. Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sektor pendidikan memerankan peran yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktifitas ekonomi lainnya.

Koentjaraningrat menyatakan (dalam Yulhendri, 2009:117) bahwa membangun sistem pendidikan yang mapan dengan berorientasi pada keunggulan bersaing merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha menciptakan manusia siap memasuki zaman yang selalu

berubah. Potensi dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia membuat manusia bisa berpikir dan selalu belajar sebagai salah satu tugas kemanusiaannya.

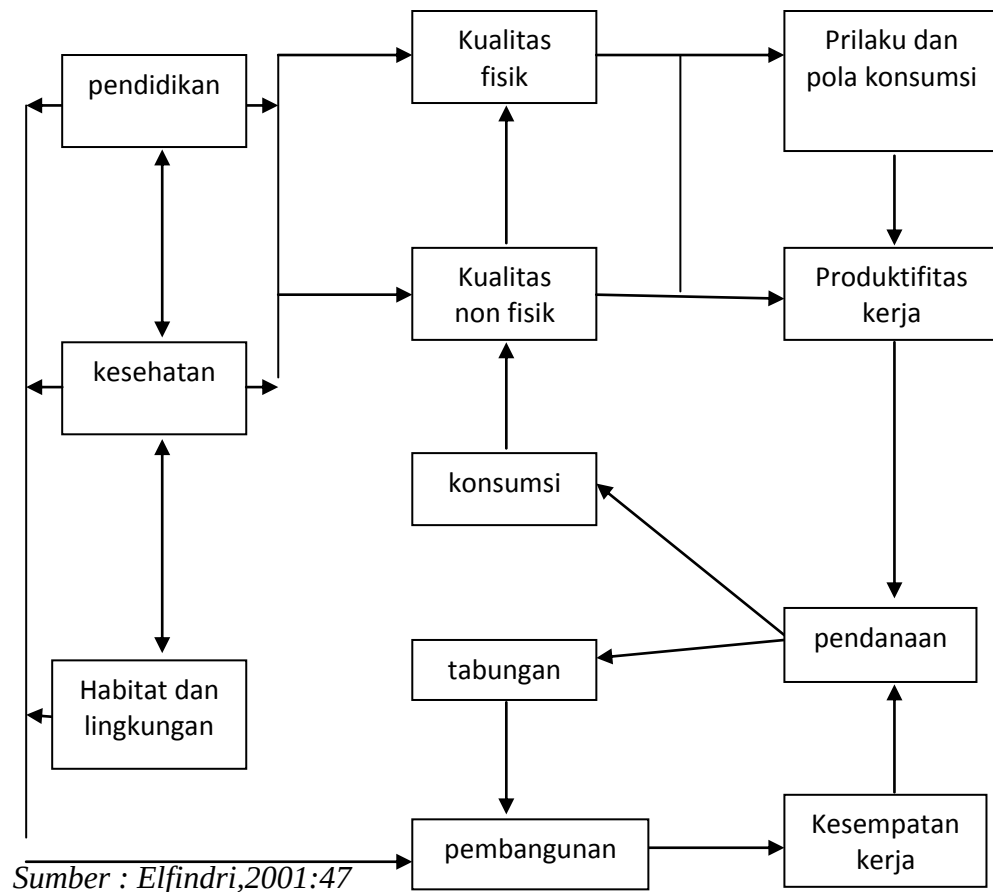
Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontiniu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya berkualitas untuk pembangunan. Pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia. Hasil pendidikan menunjang pembangunan.

Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap satu tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Menurut Mark blaug (dalam Elfindri, 2001:41) bahwa tidak seharusnya kita memandang pengeluaran pendidikan sebagai kegiatan konsumsi, tetapi hampir mirip dengan penanaman modal atau sebagai investasi.

Penanaman modal dalam bentuk pembentukan modal manusia. Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Jhingan, 2003:41)

Penanaman modal manusia dilakukan pada pendidikan formal yang dapat diperoleh oleh pelajar melalui berbagai jenjang pendidikan formal. Pendidikan merupakan hak warga negara seperti yang diatur dalam Undang – Undang Dasar

1945, dengan pendidikan masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomis bagi masing – masing individu dan manfaat sosial. Berikut ini dapat dilihat peranan pendidikan dalam bentuk gambar 1.



Sumber : Elfindri,2001:47

Gambar 1.
Peranan Pendidikan

Gambar 1 diatas menggambarkan bahwa segala sesuatu bersumber dari pendidikan. Antara pendidikan dan kesehatan saling mempengaruhi. Pendidikan sangat berperan dalam menciptakan kualitas fisik dan non fisik yang baik. Pembangunan suatu negara akan berhasil bila kualitas pendidikannya bagus. Kesempatan kerja pun diduduki oleh pekerja yang mempunyai skill yang relatif baik, Menurut Blaug (dalam Elfindri, 2001:20) bahwa tidak pernah ada pekerjaan

dengan tuntutan skill yang relatif baik tanpa membutuhkan pendidikan. Manusia sesungguhnya modal yang aktif dalam pembangunan, peningkatan produktifitas dan *benefit* modal manusia sangat ditentukan oleh keahlian dan pendidikan yang dimiliki oleh individu.

2. Tingkat Putus Sekolah

a. Defenisi Putus Sekolah

Bergeson (2006:7) menyatakan bahwa :

Putus sekolah adalah siswa yang meninggalkan sekolah untuk alasan apapun kecuali kematian, sebelum menyelesaikan sekolah dengan mendapatkan ijazah dan tidak pindah ke sekolah lain.

b. Teori Permintaan Pendidikan

Menurut Todaro (2004:425-426) :

Permintaan pendidikan sangat ditentukan oleh kombinasi pengaruh empat variabel berikut : perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari pendidikan. Variabel lain yang sangat mempengaruhi tingkat permintaan pendidikan adalah pengaruh tradisi budaya, gender, status sosial, pendidikan orang tua, dan besarnya anggota keluarga atau beban ketergantungan. Orang – orang karena kemiskinan tidak dapat melanjutkan pendidikan akan berada dalam golongan orang-orang putus sekolah atau tidak berpendidikan yang pada akhirnya sangat sulit mendapatkan bidang pekerjaan formal.

Tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh kekuatan permintaan pendidikan. Faktor penentu dari sisi permintaan terhadap pendidikan ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yaitu

pertama, harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern dimasa yang akan datang (hal ini merupakan manfaat pendidikan individual (*private benefits of education*) bagi siswa atau keluarganya. Kedua, biaya-biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan oleh siswa atau keluarganya.

Sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang (terutama golongan yang miskin) menginginkan pendidikan bukan karena alasan – alasan atau manfaat yang bersifat nonekonomis (reputasi, gengsi, kepuasan batin) melainkan hanya sebagai suatu wahana dalam permintaan akan pendidikan bisa dipastikan semakin lama akan semakin meningkat. Penurunan kesempatan kerja bagi yang tidak berpendidikan mendorong setiap penduduk untuk melindungi posisi atau prospek hidupnya dengan cara menempuh pendidikan tingkat dasar hingga tamat. (Todaro, 2004:426)

Ada dua alasan ekonomi mendasar yang memaksa kita percaya bahwa sistem pendidikan di banyak negara berkembang pada dasarnya tidak memperhatikan aspek pemerataan (*equality*). *Pertama*, biaya pendidikan individu untuk menempuh sekolah dasar secara relatif jauh lebih tinggi bagi anak orang miskin dari pada biaya yang harus dipikul oleh anak dari keluarga kaya. *Kedua*, manfaat yang diharapkan dari pendidikan sekolah dasar bagi anak – anak dari keluarga miskin justru lebih rendah. Dengan demikian adanya biaya yang lebih tinggi yang dibarengi dengan manfaat yang lebih rendah menunjukkan tingkat pengembalian (*rate of return*) investasi pendidikan seorang anak dari keluarga

miskin begitu terbatas sehingga kemungkinan besar ia akan mengalami putus sekolah pada awal tahun pendidikannya.

Elfindri (2001:75) mengungkapkan bahwa :

putus sekolah merupakan siswa yang berhenti sekolahnya karena tidak cukup biaya sekolah atau kemiskinan, pendidikan orang tua terutama pendidikan ayah, status keluarga berencana, tempat tinggal yang jauh dari sekolah, rata-rata konsumsi rumah tangga, alat penerangan rumah tangga dan beban anggota rumah tangga.

Departemen pendidikan nasional menghitung tingkat putus sekolah dengan rumus (<http://www.depdiknas.go.id>) :

$$- \dots\dots\dots(1)$$

dimana :

Tingkat DO = tingkat putus sekolah (%)

D = jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat pendidikan tertentu
(orang)

S = jumlah siswa yang bersekolah tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu (orang)

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Putus Sekolah

a. Tingkat Kemiskinan

Ada banyak defenisi dan konsep tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara harfiah miskin merupakan tidak berharta benda. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Badan Pusat

Statistik (BPS) bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami oleh seseorang sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Kebutuhan minimum terdiri dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari. Kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, pendidikan, hiburan dan lain sebagainya.

Menurut Sayogyo, menentukan tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan. Daerah pedesaan rumah tangga dengan pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun digolongkan sebagai keluarga miskin. Bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun digolongkan Miskin sekali. Sedangkan bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun, maka tergolong keluarga paling miskin. Daerah perkotaan, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun tergolong keluarga miskin. Bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun tergolong miskin sekali. Keluarga paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum,

kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktifitas pembangunan dapat tercapai sehingga untuk meningkatkan kualitas hidup dimasa depan akan lebih baik.

Todaro (2004:435) berpendapat bahwa adanya biaya sekolah yang tinggi menyebabkan investasi pendidikan seorang anak dari keluarga miskin begitu terbatas, sehingga kemungkinan besar ia akan mengalami putus sekolah.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Masing – masing keluarga berbeda latar belakang ekonominya. Ada keluarga yang latar belakang sosial ekonominya memadai, sehingga menyediakan fasilitas pendidikan juga memadai. Sebaliknya ada pula keluarga yang sosial ekonominya sangat rendah, sehingga tidak dapat memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, bahkan sekolah pun tidak. Rendahnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia cukup besar dan merata hal ini menjadi semakin parah sejak tahun 1998 ketika krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin rendah, harga barang naik semakin tinggi sehingga daya beli masyarakat sangat kurang, termasuk kemampuan masyarakat membiayai pendidikan anak-anaknya.

Biaya sekolah terbagi atas dua yaitu biaya sekolah langsung dan biaya sekolah tidak langsung. Biaya sekolah langsung seperti pembayaran uang pembangunan. Biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, beli seragam dan biaya lainnya. Biaya sekolah tidak langsung yang tinggi merupakan halangan bagi

rumah tangga miskin untuk mendapatkan pendidikan formal, sehingga mereka mengambil keputusan untuk berhenti sekolah atau putus sekolah.

Rumah tangga miskin masih mengalami kesulitan untuk membeli buku dan peralatan sekolah lainnya, termasuk membeli seragam sekolah. Wakil Menteri Pendidikan menyatakan bahwa delapan puluh persen banyak yang tidak melanjutkan sekolah karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transportasi atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah. (<http://Republika.co.id>)

Disamping itu, tingginya biaya oportunitas tenaga kerja yang harus ditanggung keluarga miskin jika anaknya bersekolah. anak – anak yang telah mencapai sekolah dasar umumnya diperlukan tenaganya di lahan pertanian keluarga atau sekedar membantu menjajakan dagangan. Bagi anak perempuan biasanya dijadikan pembantu dirumah dan yang lebih tua menjadi pengasuh bagi adik-adiknya. Jika waktu yang tersedia digunakan untuk bekerja (sehingga menghasilkan sejumlah pemasukan bagi keluarga) dan jika digunakan untuk bersekolah, maka pihak keluarga tentu saja menanggung kerugian yang disebut biaya oportunitas pendidikan (*opportunity cost education*). Kerugian akan muncul karena keluarga yang bersangkutan harus kehilangan input tenaga kerja berharga yang sangat diperlukan. Jika anak bersekolah, maka orang tua terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk mempekerjakan orang lain guna menggantikan si anak.

Akibatnya amat sulit diharapkan anak keluarga miskin setelah tamat SD bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan tercipta keluarga miskin baru dan jumlahnya akan semakin meningkat. Keluarga miskin banyak terdapat pada daerah-daerah yang jauh dari keramaian. Upaya peningkatan akses pendidikan bagi kelompok besar rakyat Indonesia yang berada di tepi pantai, di pedalaman, daerah kumuh perkotaan membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan sumber belajar siswa. Kesemua kebutuhan unsur pendidikan itu mesti disediakan oleh pemerintah. Jika pemerintah masih setengah hati mengalokasikan dana untuk itu, tetap saja akses pendidikan tidak bisa ditingkatkan termasuk tenaga kependidikan dan sumber belajar siswa.

b. Beban Ketergantungan

Pertumbuhan penduduk mempengaruhi komposisi umur penduduk yang proporsi terbesarnya adalah penduduk usia muda dan usia tua. Hal ini mengakibatkan tingginya beban ketergantungan penduduk. Indonesia masih menghadapi masalah tingginya rasio ketergantungan penduduk. Tingginya beban ketergantungan penduduk ini berarti pula besarnya penduduk yang memiliki kecendrungan yang lebih besar mengkonsumsi dari pada menghasilkan (produktif).

Beban ketergantungan merupakan jumlah tanggungan anggota rumah tangga yang bekerja terhadap anggota rumah tangga yang tidak bekerja. Biasanya penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (65+ tahun) digolongkan sebagai masyarakat yang hidupnya ditanggung oleh penduduk yang berusia

produktif. Mereka adalah anggota masyarakat yang tidak produktif karena itu harus dibantu secara ekonomis (*financial*) oleh masyarakat yang produktif. Secara matematis beban ketergantungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{—————} \times 100 \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

DR = *Dependency Rasio* (Beban Ketergantungan)

D1 = jumlah masyarakat yang berusia 0-14 tahun

D2 = jumlah masyarakat yang berusia 65 tahun keatas

D3 = jumlah masyarakat yang berusia 15-64 tahun/produktif

pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang produktif akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak, terutama untuk konsumsi pangan. Selain itu dibutuhkan pula pengeluaran rumah tangga untuk meningkatkan kualitas anak melalui pengeluaran untuk memperoleh pendidikan.

Menurut Agustina (dalam Irfan, 1999:26) menyatakan bahwa tingginya beban ketergantungan dapat pula disebabkan oleh semakin menurunnya angka kematian terutama angka kematian bayi dan penduduk usia muda yang berpengaruh pada semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut dapat mengakibatkan terjadi pergeseran struktur umur penduduk dari penduduk yang berstruktur umur muda ke struktur umur tua. Hal ini akan menambah beban ketergantungan penduduk tua dalam suatu negara atau rumah tangga.

Menurut Elfindri (2001:100 dan 106) bahwa semakin besar jumlah saudara (anggota rumah tangga), maka semakin besar pula anak untuk drop out sekolah.

Terutama anak perempuan. Besarnya beban ketergantungan dapat ditandai pula oleh besarnya jumlah anggota rumah tangga. Banyaknya anggota rumah tangga akan semakin memperbesar beban ketergantungan apabila struktur umur penduduk dalam rumah tangga didominasi oleh penduduk yang non-produktif. Beban ketergantungan sebagai jumlah tanggungan penduduk yang produktif terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif.

Pada kondisi negara atau rumah tangga yang berpendapatan rendah, maka jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk investasi anak berupa pendidikan relatif rendah. Kelley (dalam Irfan, 1999:32) menemukan bahwa besarnya anggota rumah tangga mempengaruhi komposisi penduduk dalam rumah tangga yang akan berimplikasi pada investasi pendidikan.

c. Geografis

Geografis yang mendasari karena adanya kenyataan bahwa rakyat Indonesia tersebar di berbagai wilayah yang luar biasa luasnya dan tersebar pada ribuan pulau di seluruh tanah air. Tersebarnya pulau-pulau, masyarakat Indonesia sebagian masih hidup secara kelompok dengan pola hidup yang sederhana dan pandangan tradisional. Oleh karena itu sebagian besar mereka yang tinggal di daerah terpencil kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Keadaan seperti ini merintangi tersebar luasnya kesempatan pendidikan secara merata. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ada suatu kelompok masyarakat yang banyak anak – anaknya yang mengalami putus sekolah. Masalah ini bukan karena anak tidak mau sekolah, tapi karena letak tempat tinggal mereka yang tidak mungkin

dijangkau sarana pendidikan. Wilayah seperti itu seringkali tidak memungkinkan berlangsungnya usaha pendidikan secara baik,

Lebowitz (dalam Elfindri, 2009:4) memuat review penelitian yang mengkaji kenapa terjadinya permintaan terhadap pelayanan pendidikan. Faktor utama berasal dari ketersediaan pelayanan, jarak, kondisi rumah tangga, serta kondisi anak, termasuk budaya. Jarak tempuh dapat semakin mengurangi probabilitas anak untuk mengecap pendidikan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan (Elfindri dkk, 2006) dan Kabupaten Agam (Elfindri dkk, 2006) menemukan indikasi bahwa daerah-daerah yang putus sekolah tertinggi berada pada 3 lokasi, yaitu daerah tepian pantai, daerah perkebunan, dan daerah pinggiran hutan.

Wilayah Indonesia yang luas menyebabkan terjadinya ketidakmerataan pendidikan terutama di Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur merupakan daerah Indonesia yang mempunyai topografi yang berbukit. Topografi Indonesia bagian timur daerah yang banyak terdapat daerah perbukitan, rawa, hutan dan sungai. Daerah yang berbukit menyebabkan infrastruktur yang tersedia untuk sekolah sangat terbatas. Salah satunya adalah transportasi ke sekolah yang susah ditemui sehingga siswa menghadapi kesulitan untuk pergi bersekolah. Selain itu letak sekolah yang jauh dari rumah juga merupakan tantangan bagi siswa untuk bersekolah.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

N O	PENULIS, JUDUL DAN TAHUN TERBIT	VARIABEL PENELITIAN	METODE ANALISIS	HASIL
1.	Sesmiati Skripsi “Faktor-faktor yang mempengaruhi Drop Out di Kenagarian Batu Plano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam”. 2009	a. Y (Drop Out) b. X ₁ (tingkat pendidikan orang tua) c. X ₂ (jumlah tanggungan keluarga / .bebanetergantungan) d. X ₃ (pekerjaan orang tua) e. X ₄ (pendapatan orang tua) f. X ₅ (biaya pendidikan)	Metode analisis regresi linear berganda $Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ $\text{Log } Y_i = \log a + b_1 \log X_1 + b_2 \log X_2 + b_3 \log X_3 + b_4 \log X_4 + b_5 \log X_5 + e_i$	a. Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh signifikan dan negative terhadap tingkat DO di kenagarian Batu plano. b. Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat DO di kenagarian Batu plano. c. Jenis pekerjaan orang tua tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat DO di kenagarian Batu Plano. d. Pendapatan orang tua berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat DO di kenagarian Batu Plano. e. Biaya pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat DO di kenagarian Batu Plano.
2.	Dr. Terry Bergenson Jurnal “membantu siswa yang putus sekolah, mengapa siswa putus sekolah dan bagaimana untuk membantunya (AS)”. 2006	a. Y (Drop Out) b. X ₁ (faktor pribadi) c. X ₂ (faktor keluarga) d. X ₃ (faktor sosial budaya)		a. Faktor sosial mempengaruhi drop out seperti kurang pedulinya guru terhadap muridnya. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Drop Outnya siswa. b. Faktor siswa sendiri/pribadi sangat mempengaruhi siswa untuk mengambil langkah drop out. Mereka menganggap sekolah itu membosankan sehingga prestasi mereka rendah. c. Berasal dari keluarga miskin juga mempengaruhi

				siswa untuk drop out d. Siswa drop out dapat dicegah dengan program Intervensi Dini.(program pendidikan anak usia dini yang padat praktek dan kegiatan membaca dan menulisnya), program tambahan (bantuan pelayanan, pembelajaran dan mentoring, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kemampuannya). Program peningkatan sekolah (memberikan status dan pengakuan siswa di sekolah, bantuan akademis).
3.	Burhanuddin, M.Hum Jurnal “Pemetaan anak tidak dan putus sekolah usia 7 – 15 tahun di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB : kearah penuntasan wajib belajar 9 tahun”.2007	a. Ekonomi b. Prasarana c. Fasilitas Kurang d. Kurangnya minat e. Budaya	Analisis data merupakan proses pemetaan data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner untuk ditelaah berdasarkan tujuan penelitian sehingga diketahui kecenderungan	a. Berdasarkan kategorinya baik di Kota mataram maupun di kabupaten Sumbawa barat jumlah anak yang putus sekolah jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak yang tidak sekolah sama sekali. Selanjutnya setelah diklasifikasikan, jumlah anak yang putus di SD jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak yang tamat SD tapi tidak lanjut SMP dan anak yang putus di SMP. Baik di Kota Mataram maupun di Kab. Sumbawa Barat anak tidak dan putus sekolah yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan yang berjenis kelamin wanita. b. Anak yang tidak dan putus sekolah usia 7-15 tahun di Kota Mataram disebabkan oleh faktor ekonomi 60%, minat anak kurang 24%, perhatian orang tua kurang 11%, fasilitas belajar kurang 2%, faktor budaya 2%, dan cacat 1%. Adapun di Kabupaten Sumbawa Barat karena faktor ekonomi 36%, minat anak kurang 24%, perhatian orang tua rendah 18%, ketiadaan prasarana 14%, fasilitas belajar kurang 5%, budaya 2%, dan cacat.

4	Yulia anas, SE, M.Si dan Prof. Elfindri. Jurnal“strategi penuntasan wajib belajar 9 tahun pada level rumah tangga di Kabupaten pasaman (implikasi terhadap pencapaian MDGs)”. 2009	a. Biaya pendidikan b. Motivasi untuk sekolah c. Jarak ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal	Analisis data disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini analisis data dilakukan dengan menemukan % dari rumah tangga yang akan masuk ke dalam kategori keinginan untuk menyekolahkan anak (WA), dan kemudian dilanjutkan dengan % keinginan rumah tangga membayar pendidikan (WF). Masing-masing akan dikategorisasikan sesuai dengan karakteristik dari rumah tangga. Dengan demikian diharapkan diperoleh gambaran peta persoalan kelangsungan pendidikan anak untuk jenjang menengah (SMP) di daerah-daerah yang berpotensi tinggi kegagalan penerapan Wajar 9 tahun di kabupaten Pasaman.	a. Di daerah perkebunan, permasalahan anak putus sekolah adalah karena, 1) 63,6 % rumah tangga kesulitan membiayai pendidikan anak karena faktor kemiskinan, 2) 53 % tidak adanya motivasi sekolah, baik motivasi orang tua maupun anak, 3) 25,8 % karena bekerja sebagai pekerja keluarga. b. Penyebab utama anak putus sekolah di daerah tepian hutan adalah 1) 75% karena rumah tangga mempunyai kesulitan untuk membiayai pendidikan anaknya. 2) 42,9% karena tidak adanya motivasi untuk sekolah. 3) 26,8% karena jarak ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal. c. Di daerah tepian pantai ditemukan bahwa 1) 55 % alasan putus sekolah karena tidak adanya motivasi anak untuk sekolah dan perhatian orang tua yang rendah terhadap kelangsungan pendidikan anak, 2) 50,0 % karena rumah tangga tidak memandang pendidikan sebagai hal yang penting bagi anak dan hanya menganggarkan 3,45 % dari total pengeluaran untuk biaya pendidikan anak per bulan, 3) 41,7% karena pengaruh lingkungan seperti banyaknya anak yang tidak sekolah dilingkungan tempat tinggal.
---	---	--	--	--

Berdasarkan tabel 2, beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penulis dalam pemilihan variabel dan indikatornya. Pertama, variabel terikat pada kelima penelitian terdahulu menggunakan indikator jumlah siswa putus sekolah. Indikator jumlah siswa putus sekolah memiliki kekurangan yaitu tidak relevan digunakan, untuk itu penulis menggunakan indikator tingkat putus sekolah.

Kedua, variabel bebas yang digunakan pada penelitian Sesmiati (2009) adalah pendidikan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua dan biaya pendidikan. Bergenson (2006) menggunakan faktor pribadi, keluarga dan sosial budaya. Bergenson melihat faktor pribadi dari siswa yang mempunyai penyakit atau cacat, merasa rendah diri, prestasi akademik yang buruk, tidak hadir sekolah, sering pindah sekolah, tidak menguasai bahasa utama (Bahasa Inggris). Bergenson melihat faktor keluarga dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah. Sedangkan faktor sosial budaya dari pengaruh budaya geng dan narkoba, ras dari penduduk asli Amerika dan Afro-Amerika.

Burhanuddin (2007) menggunakan variabel ekonomi, prasarana, fasilitas kurang, kurangnya minat dan budaya. Anas dan Elfindri (2009) menggunakan variabel biaya pendidikan, motivasi untuk sekolah dan jarak sekolah yang jauh dari rumah yang merupakan gambaran dari variabel geografi.

Penulis menggunakan data sekunder yang berorientasi Indonesia karena keterbatasan data apabila penulis meneliti Indonesia berorientasi rumah tangga. Penulis meneliti secara makro. Variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan geografis.

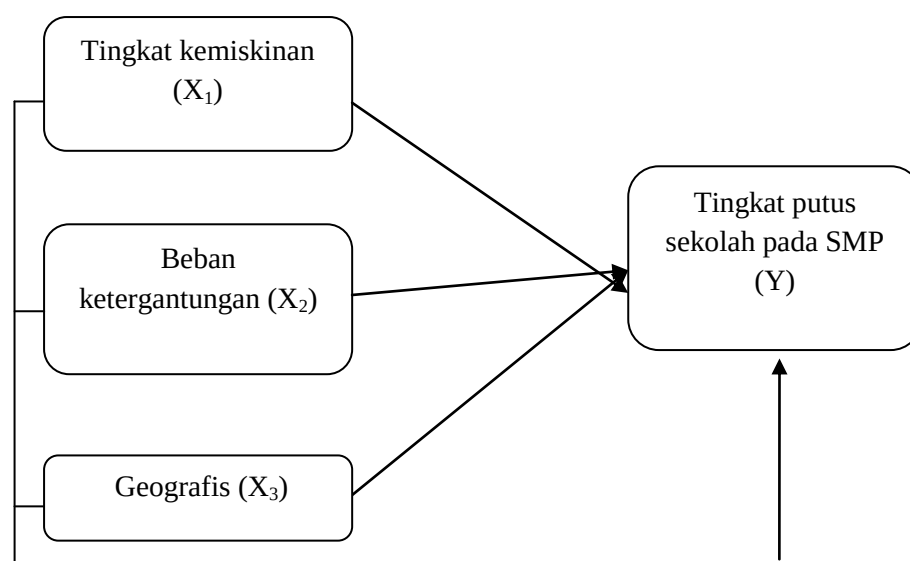
C. KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu pada tabel 2 diatas, maka variabel yang dipilih dalam penelitian ini adalah kemiskinan, beban ketergantungan dan geografis. Variabel kemiskinan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2004) dan Elfindri (2001) serta penelitian yang dilakukan oleh tiga peneliti terdahulu bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh terhadap tingkat putus sekolah. Seseorang yang dikatakan miskin akan memiliki pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi drop out oleh Sesmiati (2009) pada penelitiannya. Disamping itu Burhanuddin (2007) menggunakan faktor ekonomi sebagai variabel bebas. Variabel kemiskinan yang digunakan penulis telah dimodifikasi dari penelitian terdahulu. Indikator yang digunakan adalah tingkat kemiskinan.

Variabel kedua adalah beban ketergantungan (*dependency ratio*). Berdasarkan teori dari Todaro (2004) dan Elfindri (2001) serta penelitian yang dilakukan oleh Sesmiati (2009) dan Bergenson (2006). Elfindri mengatakan bahwa semakin besar jumlah saudara (anggota rumah tangga), maka semakin besar pula anak untuk drop out sekolah, terutama anak perempuan. Todaro menyatakan bahwa beban ketergantungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat putus sekolah. Sesmiati (2009) menggunakan variabel jumlah tanggungan keluarga dan Bergenson (2006) menggunakan faktor keluarga untuk menggambarkan beban ketergantungan. Variabel kedua ini juga hasil modifikasi dari penelitian terdahulu.

Variabel ke tiga adalah geografis. Berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Anas dan Elfindri (2009) melihat faktor geografis dari jarak antara rumah ke sekolah. Mereka menemukan daerah pinggiran hutan, perkebunan dan tepian pantai adalah daerah yang mempunyai anak – anak tingkat putus sekolah tertinggi. Penulis memodifikasi variabel geografis sebagai variabel dummy. Penulis memberikan Indonesia bagian barat dengan nilai 0 dan bagian timur dengan nilai 1.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan dalam bentuk kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.

**Kerangka Konseptual Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Tingkat Putus Sekolah pada SMP di Indonesia**

D. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat disimpulkan dengan hipotesis :

1. Tingkat kemiskinan penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Beban ketergantungan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Geografis mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan faktor geografis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia artinya besar kecilnya nilai tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia tidak ditentukan oleh tingkat kemiskinan.
2. Beban ketergantungan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia. Artinya apabila beban ketergantungan meningkat maka tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia akan meningkat juga. Semakin tinggi beban ketergantungan, maka semakin tinggi pula tingkat putus sekolah di Indonesia dengan asumsi *ceteris paribus*.
3. Variabel geografis berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia. Artinya, besar kecilnya tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia ditentukan oleh faktor geografis Indonesia. Pada Indonesia bagian timur lebih banyak anak putus sekolah sebesar 1,23 persen dari pada Indonesia bagian barat. Jauhnya jarak tempuh antara rumah kesekolah dikarenakan wilayah yang tidak efisien.
4. Tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan geografis secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan geografis berpengaruh positif terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia.

B. SARAN

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Tidak berpengaruhnya tingkat kemiskinan terhadap tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan pesat dalam pelayanan pendidikan. Berbagai program-program pemerintah bagi rumah tangga miskin telah membantu dalam menekan tingkat putus sekolah. Seperti bantuan transportasi untuk siswa dalam komponen BOS, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) maupun program-program lain. Namun demikian pemerintah perlu juga melakukan perluasan program penekanan tingkat kemiskinan. Seperti memperluas pemberian Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini hanya menjangkau beberapa kab/kota di 25 propinsi di Indonesia.
2. Beban ketergantungan sangat mempengaruhi tingkat putus sekolah. Selain tetap mengalakkan program Keluarga Berencana (KB). Disamping itu pemerintah juga dapat melakukan berbagai usaha nyata untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi kaum wanita. Maka akan tercipta kondisi-kondisi positif yang mendorong kaum wanita menjarangkan kehamilan dan menunda perkawinan. Penurunan tingkat fertilitas tersebut adalah peningkatan taraf pendidikan wanita yang diikuti oleh penciptaan kesempatan kerja bagi kaum wanita agar mereka bisa bekerja sendiri di luar rumah. Kesempatan untuk memperoleh pendapatan sendiri ini akan mendorong kaum wanita muda untuk menunda perkawinan mereka. Secara ekonomi mereka sudah dapat berdiri

sendiri sehingga mempunyai posisi yang lebih baik dalam mencari pasangan dan merencanakan perkawinan serta kehidupan rumah tangganya.

3. Sangat terpecarnya keberadaan anak-anak usia sekolah yang harus dilayani, terutama yang ada di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena kendala geografis dan transportasi. Seperti di Indonesia bagian timur dapat diatasi dengan upaya perluasan aksesibilitas. (1) Pemerintah dapat menambah jumlah sekolah dengan jumlah kelas yang tidak banyak sehingga anak – anak dapat bersekolah tanpa terkendala oleh jarak yang jauh antara rumah dan sekolah. (2) Pemerintah dapat mendirikan sekolah berasrama sehingga anak-anak tidak lagi terkendala oleh faktor geografis. (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk transportasi siswa seperti memberikan bus sekolah yang biaya perawatan dan BBMnya subsidi dari pemerintah. Dengan demikian tingkat putus sekolah pada SMP di Indonesia dapat menurun terutama di Indonesia bagian timur.
4. Tingkat putus sekolah di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas yang telah penulis teliti, karena masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Maka, disarankan pada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji dan meneliti faktor-faktor lain seperti biaya pendidikan dan pendidikan orang tua yang ada di luar variabel bebas penulis teliti sehingga akan dapat diketahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat putus sekolah di Indonesia. Selain itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji dan meneliti pada tingkat SD, SMA dan perguruan tinggi sehingga diketahui faktor-faktor apa saja yang

dominan mempengaruhi tingkat putus sekolah pada berbagai tingkatan sekolah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anas, Yulia dan Elfindri. 2009. *Jurnal Strategi Penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Level Rumah Tangga di Kabupaten Pasaman*. 14 September 2011
- Bergeson, Tery. 2006. *Jurnal Helping Students Finish School (Why Students Drop Out and How to Help them Graduate)*. 25 maret 2011
- Badan Pusat Statistik. *Indonesia dalam Angka 2008*. Jakarta : BPS
- _____. *Indonesia dalam Angka 2009*. Jakarta : BPS
- _____. *Indonesia dalam Angka 2010*. Jakarta : BPS
- _____. *Proyeksi Penduduk Indonesia menurut Umur*. Jakarta : BPS
- _____. *Hasil Sensus Penduduk 2010 Data Agregat per Provinsi*. Jakarta : BPS
- Burhanuddin. *Jurnal Pemetaan Anak Tidak dan Putus Sekolah Usia 7 – 15 Tahun di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB : Kearah Penuntasan Wajar 9 Tahun*. 12 mei 2011
- Crayonpedia. 2011. *Tinggi Angka Anak Putus Sekolah di Pekanbaru*. (www.kompas.com) 20 oktober 2011
- Denim, Sudarwan. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka setia
- Departemen pendidikan nasional. 2005. *Ikhtisar Data Pendidikan Nasional*. (<http://www.depdiknas.go.id>). 12 januari 2011
- Elfindri. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Padang : Universitas Andalas
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Terjemah Mulyadi. Jakarta : Erlangga
- Jhingan. 2002. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta : Raja Grafindo
- Irfan, Muhammad. 1999. *Pengaruh Beban Ketergantungan terhadap Tingkat Tabungan Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Madya Padang)*. Skripsi UNAND
- Mutia. Desember 2010. *80 Persen anak Indonesia Putus Sekolah karena Ekonomi*. (<http://www.Republika.co.id>). Mei 2011

- Sanjoyo. 2009. *Panel Data dengan Eviews*. (www.blog_forum_ekonometrika.com). November 2011
- Santoso, Djoko dan dkk. 2011. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Ilmu Ekonomi dalam Menghadapi Globalisasi*. Padang : UNP Press
- Sesmiati. 2009. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Drop Out di Kenagarian Batu Plano Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam*. Skripsi UNP
- Simanjuntak, Payaman. 2000. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sumodiningrat, Gunawan. 2003. *Ekonometrika Pengantar*. Yogyakarta : FE UGM
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UII
- Todaro, Michael dan Stephen Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga
- Widiaastuti, Ari. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008*. Skripsi Universitas Diponegoro
- Winarno, Wing. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EVIEWS* Edisi kedua. Yogyakarta : UPP SIIM YKPN
- Yulhendri. 2009. *Pembangunan Ekonomi Pasar, Struktur Ekonomi, Pendidikan dan Pengurangan Kemiskinan*. Padang: Unp Press.